

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian yang ada di Indonesia dan pemerataan pembangunan perekonomian Nasional tidak terlepas dari keberhasilan perkembangan perekonomian daerah. Menunjang keberhasilan ataupun kemajuan perekonomian di suatu daerah tersebut tentu banyak sektor yang mempengaruhi di dalamnya, salah satunya adalah sektor perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Lembaga keuangan baik bank ataupun non-bank pada umumnya sebagai Lembaga keuangan yang aktivitasnya ialah melakukan perhimpunan dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut kepada masyarakat berupa kredit (Putra & Wirajaya, 2013).

Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 terkait “Lembaga Keuangan” mendefinisikan Lembaga Keuangan ialah setiap organisasi yang bergerak dibidang keuangan, mengumpulkan dan mendistribusikan uang pada masyarakat umum. Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Provinsi Bali mendirikan suatu Lembaga keuangan yaitu Lembaga Perkreditan Desa (LPD) ialah lembaga keuangan non-bank dan hanya terdapat di Bali saja. LPD sendiri memiliki peran yang begitu substansial bagi pembangunan perekonomian daerah khususnya di Bali. LPD ada di setiap desa adat yang ada di Bali. Terbentuknya Lembaga keuangan ini, tentu

melihat dari keberadaan desa itu sendiri yang merupakan bagian utama dalam mencapai kemandirian, sebab desa mempunyai sumbangan terpenting untuk aset pembangunan perekonomian nasional. Desa di pandang perlu untuk diberdayakan, sehingga melalui terbentuknya Lembaga Perkreditan Desa (LPD), maka akan dapat tercapai pemerataan pembangunan perekonomian nasional pada umumnya dan pembangunan perekonomian daerah pada khususnya, (Sutika & Sujana, 2013)

Berdasarkan PERDA No.2 Tahun 2002 “Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 792 Tahun 1990 terkait “Lembaga Keuangan” mendefinisikan sebagai organisasi yang bergerak dibidang keuangan, mengumpulkan dan mendistribusikan uang terhadap masyarakat umum”. Peraturan Daerah No.3 Tahun 2017 yang mengatur terkait Lembaga Perkreditan Desa juga mengatakan bahwasanya Lembaga Perkreditan Desa sudah memberi kegunaan dalam aspek perekonomian, budaya dan social bagi Krama Desa Pakraman, dan tata kelolanya wajib ditingkatkan selaku lembaga keuangan milik Desa Pakraman. Keberadaan LPD diperlukan dalam memberi jaminan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang diatur oleh hukum adat, yaitu Krama Desa Pakraman. Hal inipun karena LPD adalah Krama Desa Pakraman.

Rasio profitabilitas adalah alat yang berguna untuk mengevaluasi sejauh mana bisnis mampu menghasilkan keuntungan. Sedangkan rasio profitabilitas ialah ukuran yang memberi penilaian atas kemampuan suatu perusahaan didalam mengejar keuntungan, sebagaimana dikemukakan oleh Kasmir (2016:117). Rasio inipun dapat memberikan informasi tentang efisiensi manajemen pada suatu perusahaan tertentu. Bukti untuk ini dapat dilihat pada keuntungan yang diperoleh dari penjualan dan pendapatan.

Septiana, Aldila (2019) mengatakan bahwasanya Rasio profitabilitas adalah rasio yang paling utama diantara seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama dari berdirinya suatu badan usaha pasti tidak terlepas dari yang namanya memperoleh suatu keuntungan. Tim manajemen pada akhirnya bertanggung jawab atas setiap tindakan atau kebijakan yang mengarah pada keuntungan bagi perusahaan. Semua konsumen laporan keuangan harus memberikan perhatian penuh pada rasio profitabilitas ini, tetapi investor ekuitas dan kreditur harus paling fokus padanya.

Pentingnya profitabilitas baik bagi badan usaha ataupun pengguna laporan keuangan, maka wajib diberikan perhatian faktor-faktor yang bisa memberikan pengaruh bagi profitabilitas diantaranya misalnya kas maupun modal. Kas merupakan asset yang paling liquid dan posisinya berada paling atas di antara asset lancar. Sehingga aktivitas kas ini sangat perlu diperhatikan dengan baik oleh manajemen. Sedangkan modal itu sendiri merupakan hal paling utama yang diperlukan untuk mendirikan suatu badan usaha dan modal yang cukup akan mampu untuk menunjang perusahaan dapat bertahan.

Menurut Harahap (2018), rasio profitabilitas menunjukkan potensi perusahaan untuk menghasilkan keuntungan, yang mungkin dipengaruhi oleh seluruh kemampuan dan sumber saat ini misalnya aktivitas penjualan, modal, kas, banyaknya staf, dan sebagainya. Didasarkan hal tersebut maka suatu badan usaha harus memperhatikan hal-hal tersebut untuk bisa mempertahankan profitabilitasnya.

Rasio perputaran kas ialah rasio yang dipergunakan dalam menilai aliran kas selama periode waktu tertentu. Dimana perputaran kas adalah kapasitas uang tunai untuk menghasilkan pendapatan sedemikian rupa dengan begitu bisa ditentukan seberapa sering perputaran uang tunai pada suatu periode tertentu. Kasmir (2011).

Makin cepat tingkat perputaran kas, maka makin cepat aset lancar diubah kembali menjadi uang tunai melalui penjualan, yang berdampak pada profitabilitas. Hal inipun sesuai pada temuan penelitian Susila (2020) yang memperlihatkan bahwasanya perputaran kas berpengaruh positif dan cukup besar bagi profitabilitas. Hal inipun sejalan dengan temuan Kartika Dewi (2014) menunjukkan bahwasanya besarnya perputaran kas berpengaruh bagi profitabilitas suatu perusahaan.

Modal adalah masalah lain yang mungkin berdampak pada profitabilitas. Modal ialah sebagai aspek utama dalam berdirinya sebuah badan usaha. Karena, modal berfungsi untuk menopang segala bentuk kerugian yang mungkin terjadi dan sangat berperan besar dalam mengembangkan usaha yang dijalankan. Dimana, dengan cukupnya modal yang dimiliki maka suatu badan usaha akan lebih berpeluang untuk mengembangkan kegiatan usahanya dan tentu akan berpengaruh terhadap profitabilitas. Hal ini diperkuat oleh Mahmoedin (2004) dimana kecukupan modal sebagai unsur yang mampu mempengaruhi profitabilitas. Rasio Kecukupan Modal sebagai rasio yang dapat dipergunakan dalam menentukan kecukupan modal. Hal inipun sesuai dengan temuan Harsono yang membuktikan bahwasanya CAR mempunyai pengaruh yang baik dan substansial bagi profitabilitas. Dan penelitian Putri & Sayu (2017) menunjukkan bahwa kecukupan modal (CAR) memiliki dampak yang menguntungkan terhadap profitabilitas.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka dalam perkembangannya LPD sangat didukung oleh seluruh aspek-aspek yang ada di dalamnya. Termasuk bagaimana LPD dalam memperoleh keuntungan ataupun hal apa yang dapat mempengaruhi kemampuan LPD dalam memperoleh keuntungan tersebut. Hal ini tentu memerlukan

perhatian manajemen yang baik dalam mengelola keuangan yang ada, agar LPD mampu meningkatkan kinerjanya untuk bertahan serta dapat berkembang.

Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, saat ini ada 1.493 desa adat di Bali yang memiliki Lembaga Perkreditan Desa. Pembentukan LPD mencapai 1.436 LPD atau 96,2 persen dengan total jumlah desa adat. Akan tetapi, baru 91,1% atau 1.308 LPD yang beroperasi. Total ada 128 LPD yang tidak beroperasi. Selain itu, dari 1.308 LPD yang beroperasi di Bali sampai akhir 2020, 541 LPD atau 41,7% mengalami penurunan aset. Proporsi LPD yang asetnya meningkat menjadi 58,3 persen atau sebanyak 757 LPD, (Wiratmi, 2021).

Melihat daripada kondisi di lapangan mengenai Lembaga Perkreditan Desa, meskipun dapat dikatakan LPD yang mengalami peningkatan aset lebih besar dibandingkan dengan LPD yang mengalami penurunan, kinerja LPD harus dapat dipertahankan ataupun ditingkatkan. Pengelolaan terhadap LPD itu sendiri tetap harus mendapatkan perhatian yang khusus untuk keberlanjutan kegiatan usaha yang dijalankan oleh LPD ke depannya. Berkembangnya atau keberlanjutan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) tentu tidak terlepas dari yang namanya memperoleh suatu keuntungan atau laba. Laba menjadi suatu tolak ukur manajemen dalam menentukan keputusan ke depannya, dan melalui laba, efektifitas manajemen juga dapat dilihat dalam mengelola aktiva maupun utang yang dimiliki.

Sebagaimana setelah dilakukannya observasi, perkembangan LPD juga terjadi di Kabupaten Gianyar, dimana kondisi LPD yang tersebar disetiap desa adat di Kabupaten Gianyar ada sebanyak 270 LPD. Jumlah LPD yang tersebar tersebut mencakup dari 7 (tujuh) kecamatan yang terdapat di Kabupaten Gianyar. Dimana, yang pertama adalah kecamatan Blahbatuh dengan jumlah LPD yang masih beroperasi

sebanyak 34 dari 36 LPD dengan kondisi perolahan laba pada Tahun 2020 yaitu, Rp 8.001.690, kedua pada Kecamatan Gianyar jumlah LPD yang masih beroperasi sebanyak 38 dari 40 LPD dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp 11.806.905, ketiga pada Kecamatan Payangan jumlah LPD yang masih beroperasi yakni ada 33 dari 48 LPD yang terdaftar dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp4.170.635, keempat pada Kecamatan Sukawati jumlah LPD yang sampai saat ini beroperasi yakni ada 33 dari 33 LPD yang terdaftar dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp 26.084.014, kelima pada Kecamatan Tampaksiring jumlah LPD yang sampai saat ini beroperasi yakni ada 31 dari 36 LPD yang terdaftar dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp1.936.400, keenam pada Kecamatan Tegallalang jumlah LPD yang sampai saat ini beroperasi yakni ada 41 dari 45 LPD yang terdaftar dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp7.739.637, dan yang terakhir yaitu, pada Kecamatan Ubud jumlah LPD yang sampai saat ini beroperasi yakni ada 31 dari 32 LPD yang terdaftar dengan kondisi laba di tahun 2020 sebanyak Rp25.756.822. Data tersebut diperoleh atas dasar data dari LPLPD Kabupaten Gianyar. (Sumber: LPLPD Kabupaten Gianyar).

Sebagai Lembaga Keuangan Desa khususnya di Kecamatan Tegallalang tentu tidak bersaing hanya dengan lembaga keuangan yang sama melainkan juga akan mengalami persaingan terhadap lembaga keuangan lainnya misalnya Bank Umum, BPR maupun Koperasi. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan akan sangat sulit bagi LPD khususnya di Kecamatan Tegallalang untuk dapat berkembang apabila LPD Kecamatan Tegallalang tidak mampu manajemen aktiva dan risiko yang mungkin terjadi.

Melihat kondisi LPD di Kecamatan Tegallalang didasarkan data yang didapatkan, bahwa LPD yang paling banyak beroperasi adalah LPD di Kecamatan Tegallalang. Namun di balik perkembangan LPD, tentu tidak luput dari berbagai persoalan. Salah satu yang menjadi persoalan dari berdirinya sebuah badan usaha termasuk LPD adalah bagaimana memperoleh suatu keuntungan. Hampir setiap LPD memiliki persoalan yang sama. Seperti halnya dengan LPD yang terdapat di Kecamatan Tegallalang. Dimana, kemampuan LPD Kecamatan Tegallalang dalam memperoleh laba masih relatif rendah. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh, Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tegallalang paling banyak beroperasi, namun jumlah laba yang diperoleh justru masih dibawah dibandingkan dengan LPD yang jumlahnya lebih sedikit beroperasi.

Kondisi Lembaga Perkreditan Desa di Kecamatan Tegallalang juga digambarkan dalam kemampuan memperoleh laba yang dapat dilihat melalui rasio profitabilitas, yaitu mengalami penurunan tingkat profitabilitas dari tahun 2019-2020. Adapun data gambaran profitabilitas dari beberapa desa yang ada di Kecamatan Tegallalang sebagai berikut.

Tabel 1.1  
Profitabilitas LPD Kecamatan Tegallalang

| <b>LPD</b>  | <b>Tahun</b> | <b>Profitabilitas<br/>(Return On Asset)</b> |
|-------------|--------------|---|
| Alas Pujung | 2019         | 2%  |
|             | 2020         | 1%  |
| Jasan       | 2019         | 1%  |
|             | 2020         | 0%  |
| Sengkaduan  | 2019         | 3%  |
|             | 2020         | 1%  |

(Sumber: LPLPD Kabupaten Gianyar)

Mengacu pada data tabel 1.2 memperlihatkan bahwasanya beberapa LPD mengalami penurunan profitabilitas, dimana seperti Desa Alas Pujung pada tahun 2019 tingkat profitabilitasnya adalah 2% kemudian pada tahun 2020 menjadi 1%, selanjutnya desa Jasan yang awalnya memiliki tingkat profitabilitas sebesar 1% menjadi 0%, begitupun dengan desa Sengkaduan juga mengalami permasalahan yang sama yaitu mengalami penurunan profitabilitas dari 3% menjadi 1%, dan masih banyak LPD lainnya juga yang mengalami permasalahan yang sama. Penurunan profitabilitas yang dialami oleh beberapa LPD ini dapat disebabkan oleh pengelolaan terhadap aktiva dan modal yang dimiliki oleh LPD tidak maksimal. Melihat kondisi LPD yang ada di Kecamatan Tegallalang, dikatakan kemampuan dalam menghasilkan laba (profitabilitas) masih relatif rendah. Serta informasi lain yang didapat yaitu, perputaran kas yang dimiliki LPD kecamatan Tegallalang kurang lancar khususnya di tahun 2019-2020 serta modal yang dimiliki masih dibawah standar yang ditentukan menurut Peraturan Gubernur No.4 Tahun 2017 terkait Permodalan LPD.

Menurut Kasmir (2016) rata-rata pengembalian asset (*Return On Asset*) adalah sebesar 30%. Sedangkan LPD yang terdapat di Kecamatan Tegallalang masih sangat jauh dari rata-rata industri yang normal. Oleh karenanya diperlukan untuk diperhatikan factor yang bisa mempengaruhi hal tersebut untuk meningkatkan kinerja LPD itu sendiri.

Berdasarkan permasalahan yang ditemui yaitu kemampuan dalam memperoleh laba masih relatif rendah serta penurunan tingkat profitabilitas pada beberapa LPD di Kecamatan Tegallalang maka peneliti tertarik untuk melaksanakan kajian studi dengan topik **“Pengaruh Tingkat Perputaran Kas dan Kecukupan Modal**



## **Terhadap Profitabilitas Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Di Kecamatan Tegallalang”.**

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berlandaskan pada penjelasan dari latar belakang, bisa ditetapkan masalah yang hendak dibahas pada kajian studi ini diantaranya.

1. LPD di Kecamatan Tegallalang memiliki persaingan yang sangat strategis terhadap Lembaga keuangan lainnya yang terdapat di Kecamatan Tegallalang
2. LPD di Kecamatan Tegallalang dalam memperoleh keuntungan masih relatif rendah dibandingkan LPD pada kecamatan lainnya yang jumlah LPD-nya jauh lebih sedikit.
3. Terdapat penurunan profitabilitas dari tahun 2019-2020 pada LPD di Kecamatan Tegallalang
4. Perputaran Kas LPD di Kecamatan Tegallalang kurang lancar di tahun 2019-2020
5. Modal yang dimiliki oleh Lembaga Perkreditan Desa masih dibawah standar dari rasio kecukupan modal yang sudah distandarisasi oleh Peraturan Gubernur yang mengatur tentang permodalan Lembaga Perkreditan Desa.

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Berlandaskan pada penjelasan dari latar belakang yang sudah disampaikan oleh penulis, sehingga bisa ditentukan fokus dan batasan dalam penelitian ini yakni pada tingkat perputaran kas dan kecukupan modal terhadap profitabilitas pada LPD Kecamatan Tegallalang.

#### **1.4 Rumusan Masalah**

Berlandaskan kepada penjelasan dari latar belakang, bisa ditetapkan permasalahan yang hendak dibahas pada kajian studi ini diantaranya.

1. Apakah Tingkat Perputaran Kas berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang?
2. Apakah Kecukupan Modal berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang?
3. Apakah Tingkat Perputaran Kas dan Kecukupan Modal secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang?

#### **1.5 Tujuan Penelitian**

Berlandaskan pada latar belakang dan rumusan permasalahan yang sudah dipaparkan, sehingga bisa ditetapkan tujuan pelaksanaan kajian studi ini yakni.

1. Pengaruh tingkat perputaran kas terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang.
2. Pengaruh kecukupan modal terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang.
3. Pengaruh tingkat perputaran kas dan kecukupan modal terhadap profitabilitas LPD di Kecamatan Tegallalang.

#### **1.6 Manfaat Hasil Penelitian**

Melalui dilaksanakannya penelitian ini, diharapkan untuk memperoleh kegunaan seperti berikut.

### 1. Manfaat Teoritis

Bisa mengembangkan pengetahuan, wawasan serta pengalaman yang erat kaitannya dengan penelitian perputaran kas, kecukupan modal dan profitabilitas.

### 2. Manfaat Praktis

#### a. Bagi LPD di Kecamatan Tegallalang

Bisa memberi informasi yang digunakan untuk pihak manajemen didalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan utamanya dalam bidang pengelolaan keuangan

#### b. Bagi Undiksha

Bisa dijadikan referensi dan menambahkan wawasan untuk kajian studi berikutnya terkhusus tentang topic penelitian kali ini.

#### c. Bagi Masyarakat

Bisa memberi tambahan wawasan terkait perputaran kas, kecukupan modal dan profitabilitas.

